



## **PUTUSAN**

**Nomor 0031/Pdt.G/2018/PA.Sgta**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

**xxxxxxxxxxx**,, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Pedagang Obat, tempat tinggal di Jalan **xxxxxxxxxxx**,i, Kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur, sebagai **Penggugat**.

m e l a w a n

**xxxxxxxxxxx**,, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tidak diketahui, tempat tinggal di Jalan **xxxxxxxxxxx**, Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka persidangan;

### **DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 Januari 2018 telah mengajukan gugatan cerai yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta dengan Nomor 0031/Pdt.G/2018/PA.Sgta, tanggal 22 Januari 2018, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 04 Februari 2004, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Wahau, dengan Kutipan Akta Nikah

Hal 1 dari 13 Put. No 0031/Pdt.G/2018/PA.Sgta



Nomor : xxxxxxxxxxxx,, tanggal 09 Februari 2004 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak.

2. Bahwa, setelah menikah penggugat dengan tergugat tinggal di rumah sendiri di Desa Wana Sari sampai sekarang namun pada tahun 2017 tergugat pergi meninggalkan rumah sampai sekarang.
3. Bahwa selama pernikahan antara penggugat dengan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : xxxxxxxxxxxx,, umur 11 tahun.
4. Bahwa, semula rumah tangga penggugat dengan tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2016 ketentraman rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan tergugat selingkuh dengan perempuan lain yang namanya tidak diketahui oleh penggugat dan penggugat mengetahui tergugat ada perempuan lain itu dari chatting di handphone tergugat yang isinya kata-kata sayang pada perempuan tersebut dan tergugat juga mengakuinya.
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat terjadi pada Juni 2017, yang disebabkan Tergugat tidak bisa merubah semua sikapnya yang selalu main dengan perempuan lain dan penggugat sudah berusaha untuk selalu mengingatkan dan tergugat minta maaf namun terus terulang lagi hingga penggugat sudah capek sering dibohongi oleh tergugat kemudian tergugat pamit untuk pergi meninggalkan rumah dan menyerahkan penggugat kerumah orang tua penggugat dan sejak saat itu antara Penggugat dan Telah pisah rumah..
6. Bahwa, penggugat telah berusaha mencari tergugat antara lain menanyakan tergugat kepada keluarga tergugat, juga kepada teman-teman dekat tergugat, namun tidak ada yang mengetahui keberadaan penggugat.
7. Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan penggugat dengan tergugat namun tidak berhasil.
8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara penggugat dengan tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dan baik sehingga tujuan perkawinan

Hal 2 dari 13 Put. No 0031/Pdt.G/2018/PA.Sgta



untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik bagi penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara penggugat dengan tergugat.

Berdasarkan alasan diatas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq. Majelis Hakim agar memeriksa, mengadili, memutuskan serta menyelesaikan perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra tergugat (xxxxxxxxxx,) terhadap penggugat (xxxxxxxxxx,);
3. Membebaskan biaya kepada Penggugat sesuai hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas Nomor 0031/Pdt.G/2018/PA.Sgta tanggal 23 Januari 2018, tanggal 12 Februari 2018 dan tanggal 02 Maret 2018 yang dibacakan di persidangan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Bahwa, berhubung Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 ;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 22 Januari 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta Nomor 0031/Pdt.G/2018/PA.Sgta tanggal 22 Januari 2018 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;



Bahwa, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak datang menghadap di muka persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor **xxxxxxxxxxx**, tanggal 09 Februari 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur. Alat bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P) ;

Bahwa, selain bukti surat tersebut Penggugat juga telah menghadirkan 1 (satu) orang saksi bernama **xxxxxxxxxxx**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di **xxxxxxxxxxx**, Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur. Saksi di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah adik kandung Penggugat ;
- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat bernama Sapriadi sebagai suami Penggugat ;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
- Bahwa, Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena sering bertengkar ;
- Bahwa, saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar ;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sejak tahun 2016 ;
- Bahwa, penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain ;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak bulan Juni 2017 karena Tergugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama ;
- Bahwa, selama pisah rumah Tergugat tidak pernah kembali lagi, dan Tergugat juga tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa, saksi sering menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Hal 4 dari 13 Put. No 0031/Pdt.G/2018/PA.Sgta



Bahwa, bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat hanya 1 (satu) orang dan Penggugat menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk menghadirkan saksi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi tersebut belum dapat dikualifikasikan sebagai saksi karena belum mencapai batas minimal pembuktian ;

Bahwa, untuk melengkapi alat-alat bukti Penggugat, Majelis Hakim membebaskan kepada Penggugat untuk melakukan sumpah pelengkap (supletoir) di depan persidangan, dan ternyata Penggugat bersedia bersumpah untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut ;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua yang tertulis dalam Berita Acara Sidang dianggap termuat dalam putusan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan oleh karenanya berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara *a quo* merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur, dan sejak tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sejak sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat selingkuh dengan wanita lain, dan puncak pertengkaran terjadi pada bulan Juni 2017 karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain, dan sejak kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai sekarang karena

Hal 5 dari 13 Put. No 0031/Pdt.G/2018/PA.Sgta



Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, maka berdasarkan alasan tersebut Penggugat memiliki **legal standing** untuk mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa untuk menegakkan ketentuan pasal 154 R. Bg jo. pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar bersabar dan hidup rukun kembali dengan Tergugat sebagaimana layaknya suami isteri, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa proses mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mengajukan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 04 Februari 2004 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur ;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik sendiri ;
3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
4. Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak tahun 2016 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat selingkuh dengan wanita lain ;

Hal 6 dari 13 Put. No 0031/Pdt.G/2018/PA.Sgta





5. Bahwa, puncak pertengkaran terjadi pada bulan Juni 2017 disebabkan Tergugat masih selingkuh dengan wanita lain, dan sejak kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pisah rumah sampai sekarang;
6. Bahwa, pihak keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, oleh karena itu putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P dan 1 (satu) orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa pencatatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sebagaimana diatur dalam pasal 285 R.Bg dan pasal 301 R.Bg) ;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti saksi tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti 1 (satu) orang saksi tersebut belum memenuhi



syarat formil dari pembuktian dan Penggugat menyatakan sudah tidak ada lagi alat bukti saksi. Oleh karenanya Majelis Hakim karena jabatannya secara *ex officio* telah memerintahkan kepada Penggugat untuk mengucapkan sumpah pelengkap (*supletoir*) untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, dan ternyata Penggugat telah mengucapkan sumpah tersebut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan 1 (satu) orang saksi tersebut adalah sebagai bukti permulaan, namun oleh karena Penggugat telah mengucapkan sumpah pelengkap (*supletoir*) untuk mendukung dalil gugatannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan 1 (satu) orang saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, keterangan saksi-saksi dan alat bukti yang ada yang kesemuanya telah dipertimbangkan dalam hubungannya antara yang satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tahun 2004 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur ;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;





- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat telah selingkuh dengan wanita lain ;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Juni 2017 karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat ;
- Bahwa, selama berpisah Tergugat tidak pernah kembali lagi dan Tergugat juga tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa, Penggugat sudah dinasehati oleh pihak keluarga dan Pengadilan juga sudah menasehati Penggugat untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat, dan mengenai hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri, dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Kemudian dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 juga ditegaskan bahwa salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal-pasal tersebut di atas terdapat beberapa unsur yang harus terpenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat, yaitu :

- Telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus ;
- Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun ;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut di atas akan dipertimbangkan satu persatu dan akan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terjadi dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur tersebut untuk melakukan perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan sesuai dengan fakta di persidangan sebagaimana tersebut di atas, bahwa terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Tergugat telah selingkuh dengan wanita lain, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa unsur kedua juga telah terpenuhi hal ini terbukti bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Juni 2017 karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan selama berpisah Tergugat tidak pernah kembali lagi dan Tergugat juga tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga, apalagi kedua pihak telah hidup secara terpisah dan sudah tidak pernah menjalin komunikasi lagi ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah dinasehati oleh Majelis Hakim dan oleh pihak keluarga Penggugat juga telah dinasehati agar hidup rukun kembali dengan Tergugat, namun usaha tersebut juga tidak berhasil, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga tersebut juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan melihat secara objektif kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah rapuh dan kehilangan hakikat dan makna dari sebuah ikatan perkawinan yang luhur, sehingga perkawinan seperti ini sangat sulit untuk dipertahankan lagi karena mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang sudah rapuh seperti itu tidak akan dapat membawa

Hal 10 dari 13 Put. No 0031/Pdt.G/2018/PA.Sgta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemashlahatan atau kebaikan akan tetapi justeru akan mendatangkan kemudlaratan atau keburukan yang lebih besar bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dengan tidak memandang siapa yang menjadi penyebab ketidakharmonisan dan keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat (*vide Yurisprudensi MA Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996*), Majelis Hakim dapat berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian rupa sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dikategorikan telah pecah (*Broken Marriage*), oleh karenanya secara sosiologis rumah tangga yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan tujuan luhur dari sebuah perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, dan sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah ar-Ruum ayat 21:

مَكْسِفًا ذُنُوبَهُمْ إِلهِ الْوَنُكُستَ لاجوزاً مَكْنِيْلَ عَجُو قَلُومَ قَمَحَرُو يَفْنِ لِكُلِّ ذَنبٍ يَلَا نَوْرَ كَفْتِيْمُو قَلَا

نَ مَوْمَتِيَا مَكَلَقِلْخَنَ أ

Artinya : *“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara tersebut merupakan perkara cerai gugat dimana Penggugat sebagai isteri yang berkehendak untuk bercerai, maka petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shughra dari Tergugat terhadap Penggugat telah sesuai dengan ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karenanya dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini :

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (xxxxxxxxxxx,) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxx,) ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 2.916.000,00 (dua juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta pada hari **Selasa** tanggal **13 Maret 2018 Masehi** bertepatan dengan tanggal **25 Jumadil Akhir 1439 Hijriah**, oleh kami **A. Rukip, S. Ag** sebagai Ketua Majelis, **Bahrul Maji, S.H.I** dan **Khairi Rosyadi, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan

Hal 12 dari 13 Put. No 0031/Pdt.G/2018/PA.Sgta



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Roby Rivaldo, S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Bahrul Maji, S.H.I**

**A. Rukip, S. Ag**

**Khairi Rosyadi, S.H.I**

Panitera pengganti,

**Roby Rivaldo, S.H**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Alat Tulis Kantor	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 2.825.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Biaya Meterai	<u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	Rp. 2.916.000,00

Hal 13 dari 13 Put. No 0031/Pdt.G/2018/PA.Sgta